

## MEDIA ELEKTRONIK DAN *GOOD GOVERNANCE* DALAM SISTEM PEMERINTAHAN LOKAL

Muhammad Chabibi<sup>1</sup>  
Universitas KH. Abdul Chalim Mojokerto  
Email : chabibi.akib@gmail.com

---

---

### Abstrak

#### Kata kunci:

*e-Media, Good  
Governance,  
Pemerintahan  
Lokal*

Di era digitalisasi sekarang ini, media memiliki hubungan yang sangat erat dengan politik. Dalam proses demokratisasi tata kelola yang baik, pemerintahan lokal telah menggunakan media sebagai instrumen sosialisasi program melalui *e-Government* pada satu sisi, dan pada sisi yang lain, sebagai publikasi visi elit politik yang mencerminkan capaian keberhasilan dan prestasi dalam memimpin suatu daerah tertentu. Sesuai tujuan awal, penggunaan media dalam pengelolaan pemerintahan lokal seharusnya untuk menunjang proses demokratisasi pemerintahan melalui prinsip *Good Governance* serta membentuk masyarakat partisipatif dalam peningkatan pertumbuhan dan pembangunan daerah. Namun, pada kenyataannya media hanya digunakan untuk mengekspos peristiwa-peristiwa (*event*) dan agenda program yang telah, sedang dan/atau akan dilaksanakan oleh pemerintahan lokal. Tulisan ini menjelaskan bagaimana penggunaan media tersebut oleh para aktor pembangunan untuk memproduksi *image* (pencitraan) sebagai manifestasi program kerja melalui perilaku dan tindakannya yang berkembang di dalam dinamika sistem lokalitas yang ada. Temuan tulisan ini adalah secara teoretis, adanya hubungan kuat dalam penggunaan media oleh pemerintah lokal antara aktor, *image* dan sistem.

### Abstract

#### Keywords:

*e-media, Good  
Governance, Local  
Government*

*In the era of digitalization, the media has a strong relationship with politics. In the process of democratizing good governance, local government has used the media as an instrument of program socialization through e-government on the one hand, and the other hand, as a publication of the vision of the political elite reflecting the achievements in leading a region. Following the original objectives, the use of media in the management of local governance should support the process of democratization of governance through the principles of Good Governance as well as forming a participatory community in enhancing the growth and development of the region. In reality, however, the media is only used to expose events and program agendas that have been, are and/or will be carried out by local governments. This paper explains how the media is used by development actors to produce images as a manifestation of a work program through its behaviour and actions that develop on the dynamics of the existing locality system. The findings of this paper are theoretically, a strong relationship between actors, images and systems in the use of such media.*

## A. Pendahuluan

Informasi dan komunikasi menjadi suatu hal penting dalam interaksi sosial baik dilakukan secara langsung maupun tidak langsung. Bahkan di era digitalisasi sekarang ini, teknologi informasi dan komunikasi memberikan dampak yang luar biasa pada kehidupan kemasyarakatan dan pemerintahan. Di Amerika Serikat, media informasi dan komunikasi sering dianggap sebagai pilar serta kekuasaan keempat (*the fourth estate*) setelah kekuasaan eksekutif, legislatif dan yudikatif di dalam suatu pemerintahan (Marijan, 2010: 281).

Di antaranya adalah media elektronik. Ia merupakan sebuah teknologi baru dalam sistem sosial yang diharapkan dapat membuka wajah baru dalam mengatur pertukaran informasi dan sekaligus interaksi sosial antara masyarakat dan pemerintah. Interaksi sosial dalam media tersebut seperti bertujuan untuk memvisualisasikan, mengkategorisasikan, berbagi permasalahan, diskusi dan pemecahan masalah sosial-kewarganegaraan dengan mengajak masyarakat dan sejumlah aktor untuk terlibat dalam proses demokratisasi dan pembangunan di tingkat nasional maupun lokal (Turke, 2008).

Jika kita melihat perkembangan aktivitas pemerintahan lokal dalam satu dekade lebih ini, pemerintah lokal membangun aktivitas tata kelola pemerintahannya dengan cara yang lebih modern, yaitu penggunaan media dengan *sub-groupnya* (media berbasis elektronik) demi meningkatkan kualitas dan mutu pemerintah dalam pelayanan publik lokal. Pemerintah lokal berbondong-bondong membuat inovasi daerah berbasis elektronik dengan tujuan untuk mempermudah layanan masyarakat.

Penelitian Hery Ristiawan (2015) menjelaskan bagaimana pemerintah lokal mengaplikasikan website sebagai strategi e-government agar masyarakat mendapatkan

akses informasi kedaerahan dengan mudah (*citizen centric*). Sebagai contoh, pemerintah lokal Kabupaten Jombang telah memanfaatkan website sebagai media *E-Government* dalam meningkatkan pelayanan publik berupa layanan elektronik atau lazim yang disebut dengan *e-service* (Aprilia, Wijaya & Suryadi, 2014). Landasan pemerintah lokal mengelaborasi media sebagai sarana pelayanan publik secara konstitusional adalah adanya Instruksi Presiden No. 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan e-government di tingkat daerah. Dari sini, pemerintah pusat berharap terciptanya peningkatan pelayanan masyarakat dengan efisien, efektif, transparan serta akuntabel dalam penyelenggaraan pemerintahan atas otonomi daerah (Sosiawan, 2008). Media pemerintahan lokal pun tidak luput dari konstelasi muatan politis dan ekonomis ketika eksistensinya diuji dengan even pemilihan kepala daerah. Hal ini sebagaimana disampaikan dalam penelitian Iwan Awaluddin Yusuf (2011) tentang bagaimana media lokal berada dalam pusaran konstelasi komunikasi politik di daerah.

Dalam penelitian ini, secara hipotetis penggunaan media tersebut tidak lepas dari realitas adanya jaringan non-struktural antara pemerintah lokal dan para pemangku kepentingan yang bermuatan *non-public services* atau motif yang menunjukkan posisi serta arti eksistensinya sendiri, sehingga pembahasan artikel ini bertujuan untuk menjelaskan bagaimana para aktor pembangunan lokal (pemerintah lokal) memiliki hubungan yang kuat dalam penggunaan media demi tegaknya tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) pada tingkat daerah.

## B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan tujuan untuk menjelaskan permasalahan yang dikaji (Vanderstoep & Johnston, 2009). Observasi langsung dilakukan terhadap ruang-ruang situs web (website) pemerintahan lokal di Kabupaten Mojokerto mulai dari Bulan Agustus 2023 hingga Bulan Desember 2023.

Ruang situs website pemerintahan lokal tersebut menunjukkan bagaimana pemerintah lokal Kabupaten Mojokerto memanfaatkan media elektronik sebagai jalan pintas dalam pemberian layanan dan informasi kinerja terhadap masyarakat. Selain itu, pelacakan proses dalam media (*process tracing*) yang menyangkut upaya analisis suatu kasus atau peristiwa yang berkaitan dengan kepentingan atau situasi yang diinginkan oleh aktor individu pembangunan daerah (Goldstone, 2003; 47).

Data yang dikumpulkan dari studi ini antara lain; 1) data peraturan pemerintah tentang penggunaan sistem informasi dan komunikasi dalam *e-services* di pemerintahan lokal; 2) data tentang isu-isu yang menyebabkan terjadinya konflik kepentingan aktor (Bupati) antara penggunaan media dan realisasi *good governance* di pemerintahan lokal; 3) data pengamatan atas ruang-ruang situs web (website) pemerintahan lokal yang memiliki relasi kuat antara aktor, *image* dan sistem.

## C. Hasil dan Pembahasan

Konsep pemerintahan bukan merupakan konsep baru dalam kajian politik pemerintahan. Termasuk juga istilah Governance pada dasarnya merupakan tata kelola pemerintahan yang berhubungan erat dengan proses pembuatan keputusan (*political decision-making*) dan proses di mana keputusan tersebut diimplementasikan atau tidak diimplementasikan. Proses pengambilan keputusan ini pun di negara kita telah diberikan wewenangnya kepada

tiap-tiap daerah sebagaimana pemberian otonomi tersebut terdapat di dalam UU Nomor 25 tahun 1999 sebagai upaya kelembagaan untuk mempercepat proses demokratisasi dan arah pembangunan di Indonesia dan daerah.

Secara definitif, World Bank (1992:1) memberikan pemahaman bahwa Good Governance itu sinonim dengan manajemen pembangunan. Artinya ia bergerak pada empat fokus permasalahan utama di dalam administrasi publik secara umum dan manajemen sektor publik secara khusus. Empat fokus itu adalah 1) *akuntabilitas*, yaitu memegang teguh prinsip tanggung jawab pemerintah atas tindakan mereka. 2) *kerangka legal pembangunan yang kuat*, yaitu struktur aturan dan hukum yang memberikan kejelasan, prediktabilitas dan stabilitas bagi sektor pribadi, yang tidak memihak dan adil untuk semua, serta memberikan landasan untuk resolusi konflik melalui sistem peradilan yang independen. 3) *informasi*, yaitu pemberitahuan tentang kondisi ekonomi, budget, niat pasar dan pemerintah dapat dipercaya dan diakses untuk semua, serta informasi kondisi krusial bagi operasi sektor swasta. 4) *transparansi*, yaitu pemerintah memiliki sifat keterbukaan untuk meningkatkan akuntabilitas, membatasi korupsi serta menstimulasi proses konsultatif antara kepentingan swasta dan pemerintah atas dokumen kebijakan (Chhtoray & Stoker, 2009; 104).

Dalam kaitannya agenda desentralisasi atau biasanya lazim dikenal dengan istilah otonomi daerah, menurut Marijan (2015;154) agenda ini diharapkan sebagai pemberian kewenangan kepada daerah bukan hanya pada sektor desentralisasi dalam ranah politik saja, akan tetapi juga persoalan administrasi lokal (desentralisasi politis). Dan persoalan desentralisasi politis sampai saat ini, tiap-tiap daerah baru menata atau bahkan ada yang sudah menata dengan rapi tentang kesiapan pemerintah lokal dalam konteks

manajerial, administrasi, organisasi dan pemberian pelayanan publik yang baik.

Untuk konteks pelayanan publik itu sendiri (*delivery of public services*), pemerintah lokal telah memanfaatkan teknologi komunikasi dan informasi dalam merespons kepentingan masyarakat lokal yang berkaitan dengan urusan administrasi publik maupun individu. Aktivitas ini sebagaimana arahan dari Instruksi Presiden No. 3 Tahun 2003 tentang kebijakan dan strategi nasional pengembangan *E-government* dengan menerapkan teknologi komunikasi dan informasi di bidang pemerintahan.

Menurut data Kementerian Komunikasi dan Informasi (Kominfo) mencatat situs web dan media sosial resmi milik pemerintah daerah setidaknya terdapat 530 situs web. Sedangkan Nur Aini Rakhmawati sebagai Laboran Akuisisi Data dan Diseminasi Informasi ITS mendata 549 situs web milik pemerintah daerah (provinsi, kabupaten, kota) di Indonesia. Akan tetapi data tersebut termasuk situs web pemerintah daerah yang bermasalah (*under-maintenance*). Sedangkan media sosial pemerintah daerah tercatat ada 158 media sosial sebagaimana tercantum di dalam situs web pemerintah daerah. Dengan rincian 123 akun media sosial pemerintah daerah luar Jawa dan ada 35 akun media sosial pemerintah daerah di pulau Jawa (Jawapos, 19 April 2017).

Pemanfaatan teknologi komunikasi dan informasi oleh pemerintahan lokal dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan yang baik dan modern. Walaupun *governance* itu adalah pengelolaan pemerintah dalam pengambilan keputusan politis maka perlu identitas “good” sebagai landasan tata kelola pemerintahan lokal yang baik dalam transparansi dan efisiensi serta bersih dari tindak korupsi. Penggunaan teknologi komunikasi dan informasi inipun sudah sejak lama dilakukan oleh negara-negara

lain yang bertujuan untuk menciptakan transparansi, efisiensi, inisiasi pemerintahan berbasis reformasi, promosi anti-korupsi (Hussain, 2014; 6), pelibatan masyarakat untuk pembangunan serta pengawasan terhadap pemerintah (Bertot, Jaeger, & Grimes, 2010: 265).

### Media dan Pemerintahan Lokal

Hubungan antara media dengan pemerintah atau (aktor pembangunan daerah) memiliki corak tersendiri yang tidak dapat dipisahkan antara keduanya. Menurut Hafied Cangara (2016 :103) hubungan erat ini bukan saja karena wartawan membutuhkan para politisi atau pejabat pemerintah sebagai sumber informasi (*maker of news*), tetapi juga para politisi maupun pejabat pemerintah memerlukan media untuk menyampaikan pikiran-pikirannya maupun kebijakan yang mereka ambil untuk kepentingan orang banyak (kepentingan publik). Tanpa melihat adanya media yang sesekali negatif kepada para politisi sehingga melahirkan pemikiran hubungan “benci tapi rindu” antara keduanya (Newton & Van Deth, 2016:283), media memiliki peranan yang sangat besar bagi kemajuan informasi yang menyajikan berbagai macam pemberitaan tentang kinerja pemerintahan ataupun tentang berjalan-tidaknya suatu kebijakan. Bahkan untuk mengukur kinerja suatu pemerintahan di lokal/daerah, media menjadi konsumsi masyarakat sehari-hari sebagai pendamping sajian sarapan paginya.

Informasi menjadi suatu hal yang penting dalam interaksi sosial, baik dilakukan secara langsung atau tidak langsung, formal atau non-formal, terinstitusi atau non-institusi, privat atau publik, konstruktif atau destruktif, fakta atau *hoax*, *love speech* atau *hate speech* dan sebagainya. Orang yang berbeda-beda bebas berekspresi dan menunjukkan penampilannya dengan latar belakangnya dan perilaku yang berbeda sehingga

menyebabkan tipe sistem sosial dan aktivitasnya yang berbeda pula (Turke, 2008:12). Karakteristik informasi media justru mengalami perkembangan yang cukup pesat mulai dari cetak hingga elektronik dan mulai dari komunikasi dunia nyata hingga dunia maya yang menembus batas-batas teritorial suatu negara. Di Indonesia sekalipun, media informasi atau teknologi informasi dan komunikasi memiliki keragaman dalam penggunaannya oleh pemerintah pusat maupun lokal. Mulai dari informasi program, visi dan misi pemerintah, akses pelayanan publik, transparansi anggaran dan kebijakan serta efisiensi dan efektivitas pengelolaan pemerintah menuju ke arah level *good governance*. Penggunaan media berbasis elektronik oleh pemerintah tersebut di antaranya seperti *e-media*, *e-government*, *e-democracy*, dan segala layanan publik berbasis elektronik (*e-public services*).

Perihal ini sebenarnya mengacu pada Instruksi Presiden No. 3 Tahun 2003 tentang penggunaan sistem informasi dan komunikasi di tingkat daerah demi menjaga performa pemerintahan yang bersifat *good governance*. Aturan yang paling mutakhir adalah peraturan yang dikeluarkan oleh Menteri Koinfo Nomor: 17/per/m.Kominfo/03/2009 tentang Diseminasi Informasi Nasional oleh pemerintah, pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten/kotamadya untuk menjadikan media elektronik (termasuk situs web dan media sosial) sebagai salah satu sarana kegiatan informasi dan diseminasi tersebut (Masyhur, 2014).

Menurut Ralf-Eckhard Turke (2008; 9) pemahaman tentang pengaplikasian media bukan hanya dibatasi oleh teknologi informasi yang biasanya dipahami sebagai pengumpulan, proses dan distribusi data, melainkan media dapat dipahami lebih luas yaitu sebagai sesuatu yang memainkan landasan struktur sosial yang dibangun oleh para aktor. Adapun bentuk-bentuk media

berbasis elektronik seperti *e-media*, *e-government* dan seterusnya adalah *sub-group* dari media di mana ia memberikan cara-cara pemberitaan untuk membentuk komunikasi dan terus-menerus memperluas kemungkinan jangkauan aplikasi. Dan sesuai dengan fungsinya, pemanfaatan media berbasis elektronik ini diberdayakan oleh pemerintah-pemerintah lokal untuk menunjang tata kelola pemerintahan berprinsip *good governance* baik melalui pelibatan media eksternal/swasta maupun media internal/pemerintah.

Bila kita mau menganalisis tata kelola politik pemerintahan lokal maka kita tidak dapat lepas dari isu-isu lokal tentang penegakan hukum dan demokrasi lokal, demokratisasi, partisipasi masyarakat lokal, birokrasi, otonomi daerah, pemilihan umum kepala daerah, transparansi anggaran dan kebijakan, serta akuntabilitas pemerintah daerah. Sekali lagi, untuk menyelesaikan persoalan isu-isu lokal tersebut, pemerintah lokal memanfaatkan teknologi komunikasi dan informasi sebagai instrumentasi pemerintahan lokal yang berkarakter responsif atau partisipatif. Dan pemanfaatan teknologi komunikasi dan informasi tersebut di antaranya adalah *e-media* dan *e-government*. Khusus *e-government*, ia dimaksudkan untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat (*citizen trust*) terhadap pemerintah dan mengembangkan evaluasi masyarakat (*citizen evaluation*) atas tindakan pemerintah secara umum. Munculnya hubungan antara *citizen trust* dengan penggunaan website pemerintah lokal telah meningkatkan konfidensi dan interaksi sosial di antara masyarakat dan pertanggungjawaban pemerintah (Tolber & Mossbergerr, 2006).

Walaupun demikian, media baik dengan segala *sub-groupnya* (*e-media*, *e-government* dan seterusnya) memiliki wajah ganda selain sebagai referensi informasi pelayanan dan administrasi publik serta masalah-masalah sosial-lokal, tetapi juga

sebagai bagian dari pencitraan aktor politik yang membutuhkan aksesibilitas dalam konstelasi politik di tiap-tiap daerah. Dengan begitu, aktor politik dapat dengan mudah membentuk persepsi publik melalui pencitraan prestasi tersebut yang melahirkan opini publik tentang tatanan pembangunan demokrasi lokal yang baik.

### **Aktor, Image dan Sistem**

Dalam sistem kehidupan manusia pasti ada aktor. Sistem kehidupan ini mempersepsikan lingkungannya terbentuk akibat dari konfigurasi internal dan tindakan dengan *skills* atau keterampilan khusus yang disediakan oleh strukturnya. Aktor bisa dilakukan oleh siapa saja tanpa batas gender apapun. Karakteristik utama aktor adalah melakukan kegiatan produksi dan reproduksi terus-menerus untuk mengorganisasikan, memperbaiki, membentuk elemen dan jaringan relasional mereka (Turke, 2008: 23). Menurut Norman Long (2001:50) dalam bukunya, *Development Sociology: Actor Perspectives*, yang disebut dengan aktor pembangunan adalah sangat kompleks dan banyak yang berasal dari berbagai arena sosial. Mereka terdiri dari para pembuat kebijakan, peneliti, para agen, pengintervensi atau bahkan mereka di tingkat lokal yang memiliki pengaruh, baik dari segi kekuasaan atau segi kepemimpinan dalam satu wilayah atau arena tertentu. Ciri aktor pembangunan adalah mereka yang memiliki banyak relasi dan kepentingan baik di tingkat mikro maupun makro. Di samping itu mereka memiliki pengetahuan dan kemampuan dalam satu bidang atau lebih (Warjio, 2016:211).

Aktor memandang dunianya terbentuk karena adanya pra-kondisi dan rasionalitas yang berkembang pada dirinya (internal). Dan stimulus dari luar apapun (eksternal) tidak dapat menentukan perilakunya. Seorang aktor memiliki otonomi dalam determinasi perilaku melalui bahasa yang digunakan, identitas,

rasionalitas dan lain-lain (Turke, 2008: 24). Dengan demikian, aktor pembangunan dalam pemerintahan lokal terus-menerus mengembangkan pencitraannya (*images*) dalam proses otonomi internalnya. *Image* (citra) yang dibangun merupakan unsur pokok dari eksistensi mereka, sehingga *image* berlangsung terus-menerus secara otonomi di mana tidak dapat ditentukan dari unsur eksternal. Akan tetapi, aktor dapat menerima stimulus eksternal melalui sudut pandang mereka sendiri yang berdasarkan pada *background*-nya. Dengan cara yang berbeda ini, aktor melakukan seleksi, proyeksi, interpretasi subyektif, pemaknaan dan penciptaan *image* bergantung kepada latar belakang epistemologinya.

*Image* dalam pandangan Turke (2008: 25) adalah elemen pokok aktor yang merupakan manifestasi aktor melalui perilaku dan tindakannya. *Image* memungkinkan aktor untuk menanggapi isu-isu yang dihadapinya dengan menerapkan dan memperkenalkan perbedaan yang menetapkan pandangan-pandangannya. Perkembangan *image* seorang aktor kemudian mampu menentukan tindakannya karena tindakan mencerminkan *image* yang muncul di mana secara riil, pembentukan *image* dan pengambilan tindakan tidak dapat dipisahkan sekalipun tidak semua *image* yang dibentuk menghasilkan sebuah tindakan. *Image* tidak muncul dari sebuah kekosongan tetapi justru ia terikat dengan persepsi, niatan dan konteks dari seorang aktor. Persepsi, rekognisi, angan-angan, penghakiman dan penalaran adalah proses penciptaan *image* yang berkonfrontasi di mana persepsi berproses atas dasar adanya niatan dan konteks pada diri aktor. Dengan demikian, niatan dan konteks mencakup keseluruhan rangkaian kondisi yang menentukan pembentukan *image*.

Sementara menurut Peteraf dan Shanley (1997) *image* bukan sekedar masalah persepsi atau identifikasi saja, tetapi

juga memerlukan pelekatan (*attachment*) suatu individu terhadap kelompok atau *group*. Pelekatan ini dapat dilakukan secara rasional maupun emosional. Di sini, *image* politik didefinisikan sebagai konstruksi atas representasi dan persepsi masyarakat (publik) akan suatu partai politik atau individu/aktor politik mengenai semua hal aktivitas politik. Hal ini senada dengan apa yang dikatakan oleh Firmanzah (2012: 231) bahwa *image* politik yang bagus adalah apa yang memberikan efek positif terhadap masyarakat. Dengan kata lain, masyarakat harus memiliki kesan dan persepsi yang bagus tentang partai politik atau kontestan individu. Semakin bagus kesan yang dipersepsikan oleh masyarakat, semakin bagus juga *image* politiknya program kerja dan platform politisi sangat mungkin sama saja. Tetapi apa yang tentunya membedakan adalah *image* yang dibawanya terekam dalam ingatan masyarakat.

Berdasarkan pada dua perspektif *image* tersebut dapat dipahami ketika pemerintahan lokal sebagai aktor pembangunan di daerah/lokal berupaya membangun, menciptakan serta memperkuat *image*-nya. *Image* yang dicitrakan oleh aktor pembangunan lokal memiliki kekuatan untuk memotivasi meraka atau individu agar melakukan suatu hal yang lebih baik lagi atau lebih banyak lagi. Akan tetapi pula, *image* tersebut dapat mempengaruhi opini publik yang sekaligus dapat menyebarkan pemaknaan-pemaknaan tertentu sesuai dengan hasil persepsi masyarakat yang bergantung pada latar belakang niatan dan konteks sosial aktor tersebut. Kalaupun demikian, sebagai konsekuensinya, pencitraan *image* tidak akan pernah bisa objektif secara mutlak. Artinya, realitas yang dibentuknya adalah realitas semu yang tercerminkan dari hubungan antara persepsi, niatan dan konteks aktor tersebut.

Sistem di sini dipahami sebagai pengertian atau pemahaman dari tujuan yang dipersepsikan atau disimpulkan yang berasal

dari serangkaian asumsi atau anggapan yang menentukan batasan-batasannya. Aktor membentuk *image*-nya dengan mengadopsi pemahaman terhadap sistem tersebut agar relevan dengan latar belakang pengetahuannya. Sistem tersebut merupakan sistem sosial yang dibentuk oleh interaksi-interaksi sosial-masyarakat dalam domain operasional. Dan pembentukan ini dapat dikatakan sebagai partisipasi masyarakat. Pendirian sistem sosial yang terorganisasikan atau terformalisasikan menunjukkan adanya gagasa-gagasan umum tentang berbagai macam tujuan yang sengaja harus diimplementasikan. Konsekuensinya, muncul penciptaan *image* sebagai konsensus antara para aktor dalam pemahaman sistem yang berangkat dari niatan dan konteks individu menjadi terkonsentrasi pada sistem sosial. Pembentukan *image* dalam sistem tersebut bukanlah bersifat ontologis akan tetapi bersifat epistemologis di mana ia berkembang dari tujuan-tujuan yang disetujui oleh aktor sesuai atas permintaan interaksi sosialnya. Dan sistem sosial ini pun dianggap oleh aktor sebagai sesuatu yang diluar dari apa yang dibentuknya seperti bertindak, berfikir, berkeputusan dan seterusnya (Turke, 2008: 37).

Dengan demikian, latar belakang epistemologi aktor menentukan niatan dan pembenaran tindakannya dalam penciptaan *image* yang bertujuan untuk menimbulkan persepsi masyarakat sesuai dengan apa yang dikontekskan oleh aktor. Secara struktural, persepsi sosial dan lingkungan ditentukan oleh tindakan-tindakan aktor yang sesuai dengan konfigurasi internal dan keterampilan-keterampilan yang dimiliki aktor. Kemudian, terjadi hubungan simultan antara niatan dan persepsi tersebut di dalam sistem sosial untuk menunjukkan kualitas dan kapasitas eksistensi aktor melalui *image-image* yang dikonstruksinya.

### **Interaksi e-Media dan *Good Governance* dalam Pemerintahan Lokal**

Sebuah tindakan dan perilaku individu aktor dapat memberikan pengaruh kepada orang lain mulai dari bentuk pengaruh yang terabaikan menjadi yang diperhatikan, dari bentuk apa yang tidak terpikirkan menjadi yang terpikirkan. Bahkan, ini memunculkan kepercayaan dan konfidensi dalam diri masyarakat yang terpengaruh. Dan sistem sosial merupakan serangkaian persetujuan atau penerimaan masyarakat yang mendasari tindakan/aksi dan perilaku aktor untuk memberikan pengaruhnya. Hal tersebut dipicu oleh interaksi yang dilakukan oleh aktor untuk selalu melakukan negosiasi dengan kondisi-kondisi yang mendasari terciptanya *image* sehingga dengan sadar, aktor memproduksi dunia hidupnya yang dibagikan dalam sistem sosial yang ada melalui media maupun sub-groupnya (*e-media*, *e-goverment*, *e-democracy* dan layanan publik berbasis elektronik lainnya).

Sebagaimana dalam pandangan Turke (2008: 47) bahwa hasil interaksi antara aktor dan masyarakat melalui media maupun sub-groupnya bukan hanya bergantung pada situasi-situasi sosial akan tetapi sangat bergantung pada berlakunya konteks dan niatan aktor yang terdapat pada budaya dan struktur sosial. Aktor politik pembangunan lokal menggunakan media atau sub-groupnya untuk membentuk sistem tata kelola pemerintah yang baik seperti efisiensi pelayanan publik, akuntabilitas, bebas korupsi dan transparansi memang untuk membuat persepsi masyarakat semakin percaya dan yakin atas kinerja pemerintah lokal tertentu. Konteks dan niatan pemerintah lokal untuk memajukan dan membangun daerahnya tidak bisa lepas dari hubungan kedekatan emosional dan sosial antara masyarakat dan pejabat pemerintah lokal yang terjalin erat di dalam budaya dan struktur sosial suatu daerah.

Sebagai otoritas yang *legitimate* dengan segala kewenangan dan kekuasaannya, pemerintah lokal seharusnya terus menerus memproduksi tindakan dan aksinya dalam urusannya yang berkaitan dengan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat lokal. Tindakan dan aksi ini pun bukan berdasarkan atas konfigurasi internal sosial dan keterampilan-keterampilan pribadinya saja sehingga kemudian aktor pemerintah layakanya sebagai pemerintah yang mengabdikan tindakan dan aksinya untuk masyarakat. Bukan sebaliknya menjadi aktor bisnis, birokratis, teknokratis maupun politis. Inu Kencana (2010: 126) berkomentar bahwa pada posisi pelayanan, kita hanya dapat mempercepat pekerjaan pelayanan, mempermudah biaya pelayanan dan memperbaiki mutu pelayanan tetapi bukan berarti dalam rangka meningkatkan hak asasi manusia dan demokratisasi. Menganalisis fenomena politik lokal tak lepas dari apa yang sudah ada sejak periode klasik dan sampai sekarang di mana ada spekulasi politik tentang bagaimana dasar dari seseorang melakukan aktivitas politik (Aminah, 2014: 5). Dan aktivitas politik pemerintah lokal tidak dapat lepas dari isu-isu politik lokal yang mendasarinya seperti penegakan demokrasi dan hukum lokal, demokratisasi, partisipasi politik dan kebijakan masyarakat, birokrasi daerah, pemilihan umum kepala daerah, akuntabilitas pemerintah daerah, rekrutmen elit politik, perwakilan politik daerah di daerah, perwakilan politik daerah di nasional, representasi suara dan politik perempuan, peran *civil society* daerah, relasi pusat-daerah, konflik pusat-daerah, integrasi-disintegrasi, pemekaran wilayah, kekerasan masyarakat daerah dan isu-isu lainnya. Tentunya, isu-isu politik daerah tersebut mendorong masyarakat daerah untuk mempertajam daya kritis nalar dalam tata kelola pemerintahan lokal dengan tetap melestarikan nilai-nilai lokalitas setempat (*local indigenous*).



Tujuan utama pemerintah lokal dalam penggunaan media sebenarnya untuk membuat tata kelola pemerintahan yang baik sesuai dengan penerapan prinsip *good governance*. Namun, *good governance* sendiri merupakan suatu agenda besar bagaimana pemerintah lokal dapat memberikan pelayanan terbaik untuk masyarakat (publik) dengan satu sisi pemerintah melakukannya sendiri atau dengan menggandeng pihak swasta (non-pemerintah) pada sisi yang lainnya. Dengan begitu, pelayanan publik yang dilakukan oleh pemerintah kebanyakan bermotif politis dan sosial, sedangkan pelayanan publik yang dilakukan oleh pihak swasta cenderung bermotif ekonomis. Pelayanan publik pemerintah bermotif politis diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan dan dukungan masyarakat terhadap kerja birokrasi suatu pemerintah tertentu sehingga nantinya dapat memberikan dukungan suara ketika pemerintah membutuhkannya di kemudian hari. Sedangkan pelayanan publik pemerintah bermotif sosial dimaksudkan untuk memenuhi tanggung jawab sosial pemerintah atas tugas-tugas pokok yang diamanahkan kepadanya. Adapun pelayanan publik swasta (non-pemerintah) bermotif ekonomis yaitu melalui mekanisme pasar diharapkan untuk mendapatkan imbalan berupa keuntungan pasar dan ekonomi.

Untuk sementara ini, interkasi media dan pemerintah lokal masih banyak berada di dalam domain pelayanan publik. Mulai dari urusan administrasi, identitas sipil, pengumpulan serta pengelompokan data dan segala urusan lainnya yang berbasis teknologi komunikasi dan informasi setidaknya menurut Ben Levin (2004: 277-278) - sesuai dengan pengalamannya bekerja di birokrasi pemerintah – mencatat tiga masalah utama dalam penggunaan media oleh politisi pemerintah dan manajemen non-pemerintah; *pertama*; cenderung menyederhanakan masalah-masalah yang kompleks. *Kedua*, cenderung menetapkan

kesalahan atau ingin menyalahkan. Dan *ketiga*, lebih berfokus pada jangka pendek sehingga cenderung mengabaikan apa yang penting dalam jangka panjang.

Pemberitaan *sub-group* media (*e-goverment*, *e-democracy*, *e-kinerja* dan lain-lain) lebih sering menampilkan masalah masyarakat yang rumit dengan cara yang sederhana, yaitu cara alur kerja yang terdapat dalam sistem. Jika masalah tersebut tidak sesuai dengan alur kerja maka akan tertolak oleh sistem secara otomatis. Oleh karenanya, kita tidak jarang menemukan masih banyaknya komplain, kendala dan laporan masyarakat di laman pengaduan terkait dengan kesulitan-kesulitan yang dihadapi oleh masyarakat. Dan perihal ini merupakan suatu bentuk contoh penyederhanaan masalah-masalah yang rumit menurut masyarakat.

Selain itu, apabila terjadi kesalahan sistem atau mungkin *error* dalam pengisian, *double account* atau pun dalam proses mengakses layanan, masyarakat cenderung lebih sering disalahkan. Dan pemerintah lokal maupun manajemen swasta (non-pemerintah) lebih serius memikirkan jangka pendek atas program-programnya dari pada hal penting lainnya yang bersifat jangka panjang.

Di dalam pemberitaan audio-video, media mungkin tidak lebih memberitakan isu-isu lokal lebih dari 15 masalah yang berkaitan dengan kinerja pemerintah lokal dan manajemen swasta dalam penegakan hukum dan demokrasi daerah, administrasi, birokrasi, transparansi, efisiensi, akuntabilitas daerah dan segala aktivitas yang menjadi tugas pokok pemerintahan lokal dan manajemen swasta dalam pemberian pelayanan publik yang baik.

Neuman (1992) sebagaimana dikutip oleh Ben Levin (2004: 278) di dalam penelitiannya, berestimasi bahwa responden Amerika Serikat yang melihat, membaca atau mendengarkan berita itu sebanyak 5000 berita setahun. Jumlah ini hanya sekitar 13

cerita sehari di mana tidak lebih dari sekedar siaran berita 20 menit saja di televisi dan jauh lebih sedikit dari pada apa yang diberitakan di dalam koran sehari-hari. Dan tentunya tidak ada orang yang bisa memperhatikan dengan benar-benar 5000 isu lokal di tiap tahunnya tersebut. Hal ini menimbulkan buah pikiran dalam diri kita bahwa ada sesuatu (isu lokal) yang sengaja ditampakkan di media dan ada saja yang tidak ditampakkan. Apalagi kalau itu media milik pemerintah daerah.

Oleh karenanya, di dalam penggunaan media terdapat hubungan kuat non-struktural antara aktor pembangunan lokal (pemerintah lokal dan manajemen swasta), *image* dan sistem dalam aktivitas serta kinerja suatu pemerintahan lokal. Demi terwujudnya *good governance* di tingkat lokal, aktor pembangunan memainkan perannya melalui media untuk semakin memantapkan eksistensinya sebagai pelayan baik untuk masyarakat. Ia merefleksikan apa-apa tentang dirinya ke dalam sistem informasi yang memiliki hubungan dengan interaksi sosial-masyarakat. Apa yang dimaksud dengan apa-apa tentang dirinya tersebut seperti visi-misi dan program-program aktor pembangunan yang terefleksikan secara operasional di dalam sistem informasi yang terdapat di media dan *sub-groupnya* (*e-government*, *e-democracy*, *e-kinerja* dan lain-lain). Secara langsung, refleksi tersebut masuk ke dalam persepsi publik tentang penilaian baik-buruk atau berhasil-tidaknya suatu kegiatan aktor pembangunan dengan pilihan-pilihan gambar-tulisan yang terekspos di dalam media dan *sub-groupnya*. Akhirnya, penilaian masyarakat (publik) tersebut berefleksi keluar dan masuk kembali ke dalam diri para aktor. Artinya, *image* diciptakan oleh aktor dalam persepsi publik sebagaimana terdapat di dalam sistem (informasi dan sosial) kemudian ia kembali lagi menuju diri aktor. Dengan demikian isu lokal yang ditampakkan oleh aktor di media

merupakan penciptaan *image* tersendiri di balik adanya sistem-sistem yang mendukung berjalannya *image* ke dalam persepsi publik.

#### D. Kesimpulan / Penutup

Media dan *sub-groupnya* (*e-government*, *e-democracy*, *e-kinerja* dan layanan berbasis elektronik lainnya) memiliki peranan penting dalam penegakan demokratisasi dan transparansi di pemerintahan lokal. Untuk menciptakan pengelolaan pemerintahan lokal yang baik (*good governance*), pemerintah lokal diharapkan mampu menampilkan bukan hanya sisi layanan publik berbasis elektronik saja dengan jargon cepat atau hemat. Akan tetapi efisiensi, transparansi, akuntabilitas, bebas-korupsi, demokrasi dan isu-isu lokal lainnya perlu juga ditampilkan demi mempertajam keterlibatan masyarakat terhadap pembangunan dan demokratisasi daerah melalui pikiran kritis dan pengawasan langsung oleh pemerintah melalui media dan *sub-groupnya*.

Demokratisasi lokal tersebut bukan hanya menjadi kewajiban serta tanggung jawab pemerintah lokal saja akan tetapi juga manajemen swasta (pihak non-pemerintah) bersama-sama memberikan pelayanan publik terbaiknya, sehingga pelayanan publik tidak terkesan hanya mengandalkan cepat dan hemat (dimensi efisiensi) saja akan tetapi juga transparansi, akuntabilitas, bebas-korupsi, dan seterusnya yang dapat menjaga prinsip *good governance* di tingkat lokal. Dengan demikian, pemerintah lokal dan manajemen swasta atau sebagai aktor pembangunan tidak memanfaatkan media dan *sub-groupnya* untuk menciptakan *image* yang sarat akan kepentingan politis-sosial dan ekonomi-pasar, sehingga permasalahan masyarakat dalam isu-isu lokal dapat terpecahkan dan terselesaikan bukan justru terkotak-kotakkan (terfragmentasi) dalam sistem informasi (media dan *sub-group/e-*

*media*) yang mengakibatkan terkotak-kotaknya masyarakat dalam sistem sosial.

#### E. Daftar Pustaka

- Aminah, Siti. (2014). *Kuasa Negara Pada Ranah Politik Lokal*. Jakarta: Kencana.
- Aprilia, Santy Nurina., Wijaya, Andy Fefta., & Suryadi. (2014). *Efektivitas Website Sebagai Media E-Government dalam Meningkatkan Pelayanan Elektronik Pemerintah Daerah: Studi pada Website Pemerintah Daerah Kabupaten Jombang* dalam Jurnal Wacana Vol. 17 No. 2
- Bertot, J. C., Jaeger, P. T., & Grimes, J. M. (2010). *Using ICTs to create a culture of transparency: E-government and social media as openness and anti-corruption tools for societies*. Government information quarterly, 27(3).
- Cangara, Hafied. (2016). *Komunikasi Politik: Konsep, Teori dan Strategi*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Chhotray, Vasudha, & Stoker, Gerry. (2009). *Governance Theory and Practise: A Cross-Disciplinary Approach*. Palgrave Macmillan.
- Firmanzah. (2012). *Marketing Politik Antara Pemahaman dan Realitas*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Goldstone, J. (2003). *Comparative Historical Analysis and Knowledge Accumulation in The Study of Revolutions*. In J, Mahoney & D. Rueschemeyer (Eds.). cambridge: Cambridge University Press.
- Hussain, Y. (2014). *Social Media as a Tool for Transparency and Good Governance in the Government of Gilgit-Baltistan, Pakistan*. In : Crossroads Asia Working Paper Series, No. 22.
- Inpres No. 3. 2003. *Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan e-Government*.
- Levin, B. (2004). *Media-government relations in education*. Journal of Education Policy, 19(3).
- Long, Norman. (2001). *Development Sociology: Actor Perspective*, London: Routledge.
- Marijan, Kacung. (2010). *Sistem Politik Indoensia*. Jakarta: Kencana.
- Masyhur, Firdaus. (2014). *Kinerja Website Resmi Pemerintah Provinsi di Indonesia* dalam Jurnal Pekommas, Vol. 17 No. 1, April 2014: 9-14
- Newton, Kenneth, & Van Deth, Jan W. (2016). *Perbandingan Sistem Politik: Teori dan Fakta*, Bandung: Nusa Media.
- Syafiie, Inu Kencana. (2010). *Ilmu Politik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Tolbert, C. J., & Mossberger, K. (2006). *The effects of e-government on trust and confidence in government*. Public administration review, 66(3).
- Turke, Ralf-Eckhard. (2008). *Governance: Systemic Foundation and Framework*. Heidelberg: Physica-Verlag.
- Warijo. (2016). *Politik Pembangunan: Paradoks, Teori, Aktor dan Ideologi*, Jakarta: Kencana.

- Vanderstoep, Scott W. & Johnston, Deirdre D. (2009). *Research Methods for Everyday Life: Blending Qualitative and Quantitative Approaches*. San Fransisco. Jossey-Bass A Wiley Imprint.
- Ristiawan, Hery. (2015). *Analisis User Website Pemerintah Untuk Pengembangan Website Berbasis Citizen Centric* dalam Jurnal Teknologi Informasi dan Komunikasi Vol. 4 No. 2, Desember 2015: 122-135.
- Yusuf, Iwan Awaluddin. (2011). *Media Lokal dalam Konstelasi Komunikasi Politik di Daerah* dalam Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (JSP) Vol. 14 No. 3, Maret 2011: 297-316.
- Jawapos. (19 April 2017). *Beri Ranking Website Pemda Mirip Kampus*.